

## Kasus Pengadaan Tanah, KPK Panggil Tiga Mantan Anggota DPRD DKI

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa tiga mantan anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Tahun 2018-2019.

"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/2).

Tiga mantan legislator DKI yang dipanggil tim penyidik KPK hari ini yakni anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 Ruslan Amsyari FS, James Arifin Sianipar, dan Ichwan Jayadi. Selain mereka, tim penyidik juga akan memeriksa Staf pada Sekretariat Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Safudin.

Sebelumnya, KPK menemukannya bukti baru dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

Bukti baru ditemukan usai menggeledah beberapa ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Beberapa ruangan yang digeledah tim penyidik yakni ruang kerja Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD, M Taufik. Pengeledahan dilakukan pada Selasa (17/2).

"Setidaknya ada enam

ruangan yang dilakukan pengeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1).

Dari beberapa ruangan tersebut, tim penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Dari pengeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," kata Ali.

KPK tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dari pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya (SJ) Tahun 2018-2019. Diketahui, Perumda Sarana Jaya adalah perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1982.

"KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan diterima, Jumat (15/7/2022). ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



## KESIAPAN JELANG UCI TRACK NATIONS CUP 2023

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari (kedua kanan) bersama pebalap sepeda Kanada Kelsey Mitchell (kedua kiri) dan ketua panitia penyelenggara Novian Herbowo (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan jelang ajang balap sepeda internasional Tissot UCI Track Nation Cup 2023 berlatih di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Rabu (22/2). Ajang yang digelar pada 23-26 Februari 2023 dengan sekitar 350 atlet dari 44 negara peserta tersebut menjadi ajang mencari poin ke dalam peringkat Union Cycliste Internationale (UCI) sebagai penentu kelolosan atlet ke Olimpiade Paris 2024.

## JakPro Pertanyakan 75 KK yang Diklaim PWKB Berhak Huni Kampung Susun Bayam

Tidak ada proses menggosur dalam aksi permukiman kembali warga Kampung Bayam. Program ini adalah Resettlement Action Plan (RAP) yang turut melibatkan pihak independen yang kredibel. Karenanya kami mempertanyakan siapa sebenarnya PWKB yang mengklaim berjumlah 75 itu.

JAKARTA (IM) - Massa Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) sempat menggelar demonstrasi dan menuntut agar hak 75 kepala keluarga (KK) untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB) segera dipenuhi. JakPro pun bertanya-tanya siapa 75 KK itu.

"Kami pun turut mempertanyakan siapa sebenarnya

PWKB yang mengklaim berjumlah 75. Sebab, terkait Kampung Susun Bayam (KSB), JakPro hanya mengetahui warga Kampung Bayam yang berjumlah 123 keluarga berdasarkan Surat Wali Kota Jakarta Utara Nomor e-1076/PU/04.00 tentang rekomendasi hasil verifikasi. Kemudian, JakPro menindaklanjuti surat tersebut, sebagai bagian dari

'keistimewaan warga' yang akan menghuni KSB," kata Vice President Corporate Secretary PT JakPro Syachrial Syarif pada keterangan, Rabu (22/2). Dia juga mengatakan tak ada penggosuran yang dilakukan saat proses pembangunan Kampung Susun Bayam. Dia menyebut JakPro melakukan dialog dengan warga hingga warga pindah setelah menerima ganti rugi. "Tidak ada proses menggosur dalam aksi permukiman kembali warga Kampung Bayam. Program ini adalah Resettlement Action Plan (RAP) yang turut melibatkan pihak independen yang kredibel," ujarnya.

"Justru, warga secara sadar bersedia tanpa paksaan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Hal itu berdasarkan dokumen serah terima dana

kompensasi," sambung Syachrial.

Kampung Susun Bayam sendiri belum dihuni. Tarif sewa bagi para penghuni belum ditetapkan. Namun biaya sewa disebut ada pada rentang Rp 615.000-765.000 yang disesuaikan dengan lantai. Tarif itu disebut sudah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Dia juga menjelaskan lahan yang digunakan untuk Kampung Susun Bayam ialah lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Saat ini pihaknya sedang mempercepat kelengkapan administrasi untuk peralihan aset.

"Selain itu, perlu dipahami pula bahwa lahan yang digunakan untuk KSB bukanlah milik JakPro, melainkan Dispora DKI Jakarta. Sehingga, terkait tindak lanjut atas pengelolaan dan pemanfaatan KSB, JakPro perlu mengantongi sejumlah kelengkapan administrasi. Saat ini, JakPro sedang mempercepat kelengkapan administrasi tersebut. JakPro akan terus mengabarkan

perkembangannya, baik kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta maupun warga Kampung Bayam," ujarnya.

Sebelumnya, sekelompok warga Kampung Bayam menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar warga segera diizinkan menghuni Kampung Susun Bayam. Pengacara publik LBH Jakarta, Jihan Fauziah, menyampaikan pihaknya melayangkan keberatan administratif kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Dirut JakPro, Iwan Takwin. Surat itu dilayangkan lantaran Pemprov maupun JakPro tak kunjung memenuhi hak atas tempat tinggal 75 KK.

"Warga yang 75 KK ini tergabung dalam satu PWKB dan di sini keberatan administratif ini sebagai upaya untuk memperingati kepada Pemprov dan JakPro untuk memberikan pemenuhan tersebut. Karena tindakan dengan tidak memberikan pemulihan hak atas Kampung Susun tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, HAM, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Jihan. ● yan

Model memperagakan busana rancangan desainer Agus Lahinta dalam Indonesia Fashion Week (IFW) 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).



## BUSANA RANCANGAN AGUS LAHINTA DI IFW 2023

Model memperagakan busana rancangan desainer Agus Lahinta dalam Indonesia Fashion Week (IFW) 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

## Semakin Parah, Indeks Kemacetan Jakarta Naik ke Peringkat 29 Kota Dunia

JAKARTA (IM) - Lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia, Tomtom International BV, menempatkan indeks kemacetan Jakarta di peringkat 29 pada 2022.

Peringkat ini naik dari yang sebelumnya menempati posisi ke 46 pada 2021. Tomtom mencatat rata-rata waktu tempuh untuk perjalanan per 10 kilometer di DKI mencapai 22 menit 40 detik. Secara umum, Tomtom menyebutkan kondisi lalu lintas kota di dunia sudah kembali sibuk setelah sebelumnya melandai karena pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19.

"Sepanjang pandemi, kami mengamati jam sibuk berlalu menjadi sebuah kenangan. Sayangnya, kondisi itu (jam sibuk) seperti sudah kembali," demikian keterangan TomTom, dilansir dari Antara, Rabu (22/2).

Lembaga itu mengukur indeks kemacetan lalu lintas di 389 kota di 56 negara pada 2022, salah satunya Jakarta.

Jakarta dan Manila di Filipina merupakan dua kota di Asia Tenggara yang berada di 50 besar indeks kemacetan berdasarkan peringkat TomTom. Namun, indeks di Jakarta masih lebih baik dibandingkan Manila yang berada di peringkat sembilan dengan rata-rata waktu

tempuh per 10 kilometer mencapai 27 menit.

Ada pun kota dengan indeks kemacetan tinggi yakni London dengan waktu tempuh per 10 kilometer yakni 36 menit 20 detik dan indeks paling rendah yakni kota Almere di Belanda pada peringkat 389 dengan waktu tempuh hanya delapan menit 20 detik per 10 kilometer.

TomTom menjelaskan metodologi pengukuran indeks kemacetan berdasarkan data kendaraan bergerak (floating car data/FCD) yang pada 2022, lembaga itu menggunakan pengukuran berdasarkan waktu tempuh perjalanan per 10 kilometer.

Menurut TomTom, waktu tempuh yang dihasilkan di kota-kota di dunia itu muncul karena sejumlah faktor, di antaranya kondisi infrastruktur jalan raya misalnya kategori jalan, kapasitas jalan hingga batas kecepatan.

Sebelumnya, lembaga itu menyebutkan pandemi Covid-19 menjadi penyebab atau faktor utama yang menurunkan tingkat kemacetan kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta.

Pada 2020, indeks kemacetan di Jakarta sempat berapa pada peringkat ke-31 dan membaik pada 2021 pada peringkat ke-46. ● yan

## Pj Gubernur DKI: Pengadaan Mobil Listrik Hambat Pertumbuhan Kendaraan

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menilai pengadaan mobil listrik oleh Pemprov DKI tak mengurangi macet. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan mengurangi kemacetan butuh waktu.

"Ya namanya mengurangi kemacetan harus punya waktu," ujar Heru di Posyandu Balita Cempaka 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (22/2).

Heru mengatakan pengadaan mobil listrik dapat menghambat pertumbuhan kendaraan roda empat. Dia mengatakan hal itu bisa mengurangi kemacetan secara perlahan.

"Pengadaan mobil listrik menghambat pertumbuhan kendaraan mobil. Pelan-pelan mengurangi kema-

cetan. Ya, menghambat pertumbuhan mobil," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyroti rencana pembelian 21 mobil listrik oleh Pemprov DKI untuk kendaraan dinas pejabat.

Menurut Gilbert, pengadaan mobil listrik bukan hal yang mendesak.

"Saya tidak melihat itu sesuatu yang mendesak, apa yang mau dikejar sih? Nggak jelas targetnya," kata Gilbert saat dihubungi, Selasa (21/2).

Gilbert mengatakan pemeliharaan kendaraan listrik mahal. Apalagi, katanya, jika kendaraan listrik bermasalah bisa rusak total. "Pemeliharaannya nggak murah juga, targetnya mau green car tidak polusi tapi kalau rusak kan juga

rusak total. Nggak jelas, belum jelas kan," ucapnya.

Gilbert menyebut pengadaan mobil listrik bukan solusi mengurangi kemacetan di Jakarta. Dia heran mengapa bukan transportasi publik yang dipercepat.

"Tidak membumi kebijakannya, jangan terlalu dipaksakan. Ini tidak mengurangi kemacetan. Yang penting tuh percepatan perbaikan transportasi publik," tuturnya.

"Mobil listrik bukan menjadi jawaban kemacetan Jakarta. Kenapa mobil listrik? Kenapa nggak transportasi publik yang dipercepat," imbuhnya.

Dalam situs Sirup LKPP, pagu anggaran untuk pengadaan mobil listrik oleh Pemprov DKI ialah Rp 20,3 miliar. Mobil yang dibeli berjenis Hyundai IONIQ 5 EV Signature. ● yan



## PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PEMILU DI DEPOK

Petugas Pantarlih melakukan coklit data pemilih untuk Pemilu 2024 di rumah warga di Cisalak, Depok, Rabu (22/2). KPU Kota Depok menugaskan 5.558 orang petugas Pemukhtahiran Data Pemilih (Pantariih) untuk melakukan pencocokan dan penilitian (Coklit) data pemilih dengan cara rumah ke rumah guna mengantisipasi ketidaksesuaian data Pemilu 2024.

**PENGUMUMAN**

Likuidator PT INSPIRASI CEMERLANG INDONESIA (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pelaksanaan pembebasan harta kekayaan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses likuidasi telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, dan laporan pertanggungjawaban dari Likuidator mengenai keseluruhan proses pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi termasuk pembagian sisa harta perseroan telah disampaikan oleh Likuidator kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dan diterima dengan baik oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inspirasi Cemerlang Indonesia Berkedudukan di Jakarta Utara, yang telah dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 22 Februari 2023 Nomor 48, di buat di hadapan Dini Lastari Siburuan, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta").

Akta tersebut sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan (quit et de charge) kepada Likuidator sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Likuidator Perseroan.

Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 Februari 2023  
Likuidator  
Ttd

## DITERJANG OMBAK GANAS

### Kapal Muatan Pangan Bersubsidi KJP Karam di Kepulauan Seribu

JAKARTA (IM) - Kapal logistik KM Bahtera 2 karam di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu pada Rabu (22/2) dini hari. Kapal karam usai diterjang ombak tinggi saat kondisi cuaca buruk.

Menurut Kasatpol PP Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Edi Syahrudi, kapal berangkat pada pukul 03.00 WIB dari Dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Setelah dua jam perjalanan, angin bertiup kencang hingga membuat ombak mengganas. Ombak besar menghantam kapal hingga

setengah badan kapal karam.

"KM Bahtera 2 dinakhodai Satibi dengan empat anak buah kapal dengan membawa pangan bersubsidi KJP untuk warga Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sabira," kata Edi.

"Kapal akhirnya karam hingga hanya terlihat tenda kapal, sehingga kapal dievakuasi ke Pelabuhan Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang," imbuhnya.

Kapal itu dievakuasi petugas gabungan menggunakan sejumlah kapal nelayan yang ada di sekitar perairan Pulau Pari. "Tidak ada korban dalam peristiwa ini," katanya. ● yan

**INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN**

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Maret 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

**Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo**

Jalan H. Ramli Umar No. 29  
Bungo Barat, Jambi

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin Kantor Cabang Jambi (0741) 5912535

Hormat Kami,  
PT Bank KB Bukopin, Tbk

**KB Bukopin**